

Barang Bekas Dan Intrepeneurship Birokrasi

UIN Malang saat ini sudah tampak lumayan rapi. Dulu keadaan kampus beridentitas Islam ini sangat sederhana. Sementara orang menyebutnya sekedar sebagai tempat mengaji. Memang pada awal saya memimpin kampus ini, fasilitas yang tersedia sangat terbatas dan serba sederhana keadaannya. Dana untuk mencukupi kebutuhan itu, tidak tersedia. Oleh karena itu, sebagai pimpinan saya berusaha mencari cara apa saja yang memungkinkan saya lakukan. Salah satu alternatif yang saya tempuh ketika itu, membeli barang bekas. Orang mungkin tidak percaya jika diberi tahu bahwa, sarana pendidikan di kampus ini, dulu tidak selalu didapat dengan cara membeli barang baru. Karena tidak tersedia dana yang cukup, maka barang bekas pun dibeli. Saya tidak peduli, apa saja yang masih bisa dimanfaatkan saya beli, asalkan masih layak pakai. Alasan saya praktis, yaitu agar dapat diperoleh barang yang murah, dana mencukupi, dan kebutuhan terpenuhi. Dana untuk membeli itu pun tidak sedikit yang saya peroleh dari urunan teman-teman dan sumbangan dari orang yang menaruh simpatik. Saya memulai memimpin kampus ini awal 1998, ketika Reformasi mulai bergulir, pemerintah tidak memiliki uang.

Di tengah menghadapi kebutuhan sarana pendidikan yang mendesak, saya mendapat informasi, ada bank yang bangkrut. Meja, kursi, lemari dan lain-lain yang dimiliki dijual. Maka, saya sebagai ketua STAIN Malang, --- kini telah menjadi UIN Malang, tidak malu-malu, lihat barang-barang bekas itu, barangkali harganya murah dan cocok untuk memenuhi kebutuhan kampus. Ternyata benar, ada beberapa kursi, meja, almari dan barang peralatan kantor lainnya yang cocok, baik untuk keperluan kantor maupun meja untuk ruang kelas. Begitu juga terdapat beberapa almari, meja untuk tamu dan lain-lain. Barang milik bank swasta yang bangkrut yang masih kelihatan layak pakai, saya beli untuk memenuhi kebutuhan kampus.

Pemanfaatan barang bekas juga untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Ketika itu saya melihat dan menghitung sendiri bahwa kursi-kursi yang tersedia di masing-masing kelas tidak mencukupi kebutuhan. Maka, saya coba lihat-lihat di gudang. Ternyata, di sana masih menumpuk kursi-kursi bekas, yang katanya, sudah dihanguskan beberapa tahun lalu, karena keadaannya sudah rusak. Kursi yang sudah dianggap tidak layak itu, menurut hemat saya, sesungguhnya masih bisa diperbaiki. Maka, saya panggil ahli meuble untuk memperbaiki. Ternyata, tidak kurang dari 500 an buah yang bisa diperbaiki dan dipelitur kembali. Kekurangan meja, kursi kuliah tersebut akhirnya dapat dipenuhi dari cara pemanfaatan barang bekas seperti itu. Padahal sebelumnya sebagaimana dikemukakan di muka, kursi-kursi tersebut sudah dinyatakan dihanguskan.

Persoalan lain, bahwa sekalipun kampus ini sudah cukup tua, ---berdiri sejak awal tahun 1960 an, ternyata belum memiliki meja sidang yang pantas. Saya kemudian lihat-lihat di beberapa ruang. Ternyata saya menemukan beberapa papan bekas di aula tua. Kayu-kayu itu sesungguhnya, sekalipun sudah tua, masih kuat. Semuanya kayu jati. Sekali lagi, saya panggilkan tukang meubel, agar kayu-kayu tua tersebut dijadikan sebagai bahan untuk membuat meja sidang. Ternyata, hasilnya sangat bagus dan mencukupi untuk membuat meja sidang yang setiap waktu diperlukan. Sampai saat ini tidak banyak orang tahu dan mengira, bahwa meja itu dibuat dari kayu bekas.

Penggunaan barang bekas di lingkungan kantor pemerintah tidak lazim dilakukan. Sebab, birokrasi pemerintah biasanya tidak menempuh cara seperti itu. Kantor pemerintah biasanya, semua kebutuhannya dipenuhi dari dana pemerintah melalui proyek. Saya berpandangan bahwa semestinya kantor pemerintah pun justru harus mempelopori agar selalu lebih hemat dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak seharusnya instansi pemerintah selalu menempuh pendekatan formal, menunggu ada proyek, apalagi berakibat mahal dan sering diwarnai oleh suasana penyimpangan. Instansi pemerintah pun harus menghindar dari hal yang bersifat mubadzir. Terus terang, saya kurang begitu paham, mengapa suasana serba formal seperti itu ada di mana-mana. Akibatnya, tidak sedikit kantor, gedung sekolah dan bahkan juga perguruan tinggi, tampak kurang terawat, karena proyeknya datang terlambat. Dengan cara kerja seperti itu, apa yang berbau milik pemerintah menjadi tampak kurang bersinar dan kurang terawat. Cara berpikir birokratis seperti itu menjadikan pejabat dan pegawai pemerintah kurang kreatif, semua serba nunggu. Kerja berstandar memang pada satu sisi baik, tetapi bukankah sesungguhnya kehidupan ini tidak selalu bisa distandardkan. Saya pribadi, karena tidak begitu menyukai hal yang berbau terlalu formal, maka apapun saya lakukan, asal hal itu halal, artinya tidak merugikan dan bahkan menguntungkan negara, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan kampus yang berstatus milik pemerintah ini, sebagaimana contoh di muka.

Selama ini saya tidak begitu bisa bekerja lambat, harus menunggu lama-lama, sementara persoalannya sudah harus diselesaikan. Sesuatu yang seharusnya diperbaiki, menurut hemat saya, segera saja diperbaiki. Tidak perlu menunggu DIPA. Jika tidak ada dana, segera mencari, tidak lantas menunggu. Pandangan seperti inilah yang melahirkan pemikiran, bahwa seharusnya pikiran birokratis ini diubah menjadi pemikiran entrepreneurship, sehingga muncul Konsep "Intrepeneurship Birokrasi". Pemikiran ini sengaja saya kemukakan, atas pertimbangan bahwa dengan peraturan yang terlalu ketatpun ternyata penyimpangan justru malah menjadi-jadi. Siapa tahu, bahwa dengan pemberian kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih luas, penyimpangan di birokrasi yang merugikan pemerintah, yang selama ini banyak terjadi, akan semakin berkurang. Bukanakah setiap orang sesungguhnya berkeinginan untuk diberi kepercayaan penuh dan peluang-peluang berprestasi. Selama saya ikut memimpin perguruan tinggi yang tidak kurang dari 25 tahun, melihat fenomena bahwa seseorang akan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, jika kepercayaan itu diberikan sepenuhnya.

Akhir-akhir ini saya justru mengkhawatirkan, apa yang akan terjadi jika birokrasi terlalu ketat seperti diberlakukan akhir-akhir. Rasa memiliki terhadap institusi tidak akan bisa tumbuh secara maksimal. Para birokrat seperti selalu merasa akan salah dan terancam keselamatannya jika berani berkrasi, sekalipun menguntungkan pemerintah. Selain itu juga akan terjadi jarak yang bersifat psikologis antara birokrat di satu sisi dengan institusi di pihak yang lain. Lagi-lagi kemudian rasa memiliki, tanggung jawab dan kebanggaan terhadap institusi tidak tumbuh, karena tidak adanya kepercayaan dan keleluasaan dalam mengambil keputusan. Kiranya semua itu perlu dipikirkan oleh para ahli, bagaimana agar pelayanan birokrasi terhadap masyarakat bisa dimaksimalkan, kreatifitas berkembang dan penyimpangan birokrasi semakin dapat diperkecil. Beberapa aspek itu perlu diperhatikan secara utuh dan padu. Keberhasilan satu aspek tetapi merugikan aspek lainnya, juga tidak akan membawa kesempurnaan, sebagaimana yang diinginkan bersama, membawa bangsa ini maju, adil dan makmur. Allahu a'lam